

**PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN, DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**Amries Rusli Tanjung  
Desi Hariani  
Sri Indrastuty.S**

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau

***Abstract***

*This study aimed to examine the effect of the financial administration officials competencies, internal control systems and financial oversight of the local value of the local government financial reporting information to the object of research on education seluruh Indragiri Hulu district, amounting to 41 on education. The sampling technique using purposive sampling. method of data collection is by distributing questionnaires. Analysis using multiple regression.*

*The results of this study it is concluded that the competence of the financial administration officials and financial control area berpengaruh positive significant value of information while the local government financial reporting internal control system variable has no effect on the value of the local government financial reporting information.*

*In this study the magnitude of the effect that the R2 of 0.555 or 55.5% indicate that the competence of the financial administration officials and regional financial oversight of financial reporting information affecting the value of 55.5%, because in the world of government, every part of government must be filled by the right person, ie which has competence in accordance with the qualifications specified. So is the financial oversight of local government has an influence on the financial statements because the information value of the government's financial oversight is a medium that can support to produce reliable financial statements and meets the characteristics of financial reporting information value that has been set. While at 44.5% influenced by other variables.*

**Keywords:** *value of information, financial administration officials competencies, internal control systems and financial control area*

**1. PENDAHULUAN**

Wacana tentang *good governance* atau pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka belakangan ini. *Good governance* sendiri dilandasi oleh tiga pilar utama, yaitu *akuntabilitas,*

*transparansi keuangan dan partisipasi publik.* Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Wujud lain dari implementasi akuntabilitas adalah dengan lahirnya Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan didalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwardjono 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Pelaporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 ternyata belum ada perbaikan dibandingkan tahun 2011, sehingga hasil penilaian oleh BPK masih tetap memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Kesalahan yang ditemukan tim BPK sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu :

*Pertama* adanya kekurangan kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah atas sisa uang persediaan dan adanya potongan pajak yang belum disetorkan ke kas daerah; *Kedua* BPK RI menemukan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern diantaranya (1) BUD Kabupaten Indragiri Hulu belum menerapkan *Treasury Single Account*, (2) terdapat kesalahan penganggaran belanja modal dan belanja barang di 25 SKPD (3) terdapat penyertaan modal berupa aset kepada PDAM Tirta Indra yang tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan dokumen yang sah dan memadai, (4) penyertaan modal kepada PD Indragiri dan tiga aset yang belum diketahui tidak dapat diyakini kewajarannya. *Ketiga* terdapat sebagian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 yang merupakan hasil pengadaan tahun 2012 dan 2011. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum selesai melakukan inventarisasi kembali dan memvalidasi atas Aset Tetap.

Selain itu, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu selama lima tahun berturut-turut memperoleh opini *disclaimer*. Untuk itu Kabupaten Indragiri Hulu berupaya memperbaiki opini *disclaimer*, dan terbukti LKPD Kabupaten Indragiri

Hulu memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LKPD tahun 2011 dan 2012. Meski demikian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tetap berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menyusun LKPD sesuai dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, guna meningkatkan kualitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi target Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. (<http://inhukab.go.id/>).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Sehingga perlunya pembenahan terhadap sistem kerja pada pegawai pemerintah daerah terutama bagian penatausahaan keuangan agar nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan bermanfaat serta bernilai informasi yang akurat.

Hal yang paling penting yang berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah diperlukannya *Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan* yang handal dan berkualitas. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandaskan atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Mondy, 2012: 261). Kompetensi menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu penyebab banyaknya pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) adalah dikarenakan minimnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan dan masih banyaknya SKPD yang belum menguasai dan paham soal pengelolaan keuangan daerah alasannya dikarenakan banyaknya pejabat penatausahaan yang bukan berlatarbelakang jurusan akuntansi sehingga laporan keuangan sulit untuk dibenahi dengan baik. Maka, untuk mengatasi hal tersebut perlunya diberikan pelatihan dan pengembangan yang lebih optimal untuk meningkatkan kompetensi pejabat penatausahaan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik kompetensi pejabat penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh SKPD, maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten karena dengan adanya kompetensi yang memadai, maka nilai informasi yang tersaji dalam laporan keuangan akan semakin membaik sehingga dapat menjadi pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Hal kedua yang memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah *sistem pengendalian intern*. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 pasal 33 ayat (1) yaitu : untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tersedianya kompetensi pejabat penatausahaan keuangan yang berkualitas dan didukung dengan adanya pengendalian intern yang baik diharapkan dapat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang bernilai informasi yang akurat. Akan tetapi selain kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan pengendalian intern ada hal penting lain yang harus diperhatikan yaitu *pengawasan keuangan*. Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar pengaturan dan pengelolaan segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam bentuk APBD, dapat dilakukan tidak menyimpang dari rencana yang digariskan untuk mencapai tujuan. Artinya pengawasan keuangan daerah

dapat menjamin kesesuaian pengelolaan APBD dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. (Nanang Budianas 2013.blogspot.com)

Penelitian Arfianti (2011) di Kabupaten Batang menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Penelitian Fadila Husna (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas sumberdaya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yg dilakukan oleh Indriasari (2008), di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan bahwa kapasitas sumberdaya manusia tidak memberikan pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. disebabkan kondisi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tatausaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Namun berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Yuliarta (2013) di Kota Padang. hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menjadi dasar untuk pentingnya penelitian ini perlu dilakukan dengan judul "***Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu***"

## 2. TELAAH PUSTAKA

### **Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen kepada pemakai tentang pengelolaan keuangan yang di percayakan kepadanya. Pemakai akan membaca laporan keuangan sebagai sebuah laporan pertanggungjawaban. Tentu saja laporan keuangan sebagai sebuah laporan pertanggungjawaban harus dapat dipahami dengan baik bagi para pemakai. (Mulya, 2013:13)

Menurut Suwardjono (2005:75) Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial Negara.

*Laporan Keuangan Pokok terdiri dari :*

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk mengakui pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas telah diterima direkening kas umum Negara atau daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara atau daerah. Namun, bila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Menurut (Suwardjono, 2005:111) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) :

- a. Relevan: *Informasi yang relevan* : memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*time lines*) dan Lemgkap.
- b. Andal: Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan , tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut

secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik : penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

### **Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 tahun 2005, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi parapembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti tersebut di atas, maka informasi yang disajikan hendaknya memiliki nilai.

Menurut Suwardjono (2005:165) agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi akan

bermanfaat apabila informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Berdasarkan GASB (1999) dalam Concepts Statement No. 1 informasi harus memiliki karakteristik dasar sebagai berikut: keterpahaman (understandability), keterandalan (reliability), keberpautan (relevance), ketepatanwaktuan (timeliness), ketaatan (consistency), dan keterbandingan (comparability).

#### 1. Keterandalan

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

#### 2. Ketepatanwaktuan

Berdasarkan PP Nomor: 24 Tahun 2005, Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus memenuhi kriteria berikut ini.

#### 3. Ketaatan

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005, perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode keperiode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### 4. Keterpahaman

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud (PP Nomor 24 Tahun 2005).

### **Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan**

Kompetensi dimensinya sangat luas UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 menyatakan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Menurut keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 (dalam Yuliarta 2013) ditentukan bahwa Kompetensi adalah kemampuan

dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang ditempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja.

Oleh karena itu, kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi. (Mondy, 2009: 261).

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

### **Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut Mardiasmo (2002: 208) Pengendalian merupakan internal control yang berada dibawah kendali eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin bahwa strategi dijalankan secara baik, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

Pengendalian intern menurut Permendagri No.13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Laporan COSO dalam Aditya, 2013 mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

### **Pengawasan Keuangan Daerah**

Mengenai pengertian pengawasan, George S Terry (dalam Fikri: 2013) menyatakan, *Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with the plan.* Dari pengertian tersebut nampak bahwa pengawasan dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu kegiatan yang sedang berjalan akan tetapi justru pada hasil kegiatan yang sedang berjalan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010, pengawasan keuangan daerah



merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan mengacu pada suatu bentuk monitoring yang diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah ialah:

1. pengaturan dan pendapatan
2. perencanaan dan penganggaran
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
4. pertanggungjawaban keuangan daerah
5. pendapatan dan belanja daerah

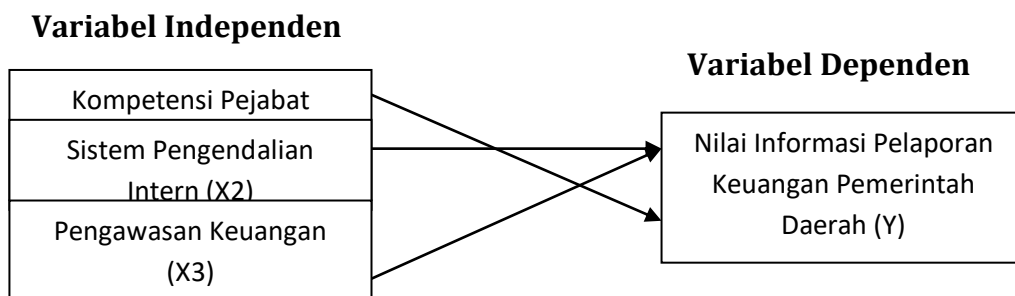
Berdasarkan konsep teori dan berbagai hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H1 :*Kompetensi Pejabat Penatausahaan berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

H2 :*Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*

H3 :*Pengawasan Keuangan Pemerintah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**



### 3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 sampai selesai.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupataen Indragiri Hulu berjumlah 41 SKPD, yang terdiri dari Sekretaris Daerah,

Berikut data SKPD yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu :

Tabel 3.1 SKPD Kabupaten Indragiri Hulu Prov. Riau.

No	Unit Kerja	Kuesioner yang dibagikan
1	Sekretaris Daerah	3
2	Sekretaris DPRD	3
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda )	3
4	Badan Penanaman Modal Daerah ( BPMD )	3
5	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda )	3
6	Badan Pengawas Daerah ( Bawasda )	3
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah ( Bapemades )	3
8	Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat Dan Infokom	3
9	Badan Pendidikan Dan Pelatihan	3
10	Dinas Pendapatan Daerah	3
11	Dinas Pendidikan	3
12	Dinas Perhubungan	3
13	Dinas Kesehatan	3
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Pemukiman Penduduk	3
15	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultural, Peternakan Dan Perikanan	3
16	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan	3
17	Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi	3
18	Dinas Pertambangan Dan Energi	3
19	Dinas Pemuda Dan Olahraga, Budaya Dan Pariwisata	3
20	Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan	3
21	Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman Dan Prasarana	3
22	Dinas Pertahanan	3
23	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	3
24	Kantor Arsip Dan Perpustakaan	3

Sekretaris DPRD, Dinas, Badan, Kantor, RSUD, dan Kecamatan. Keseluruhan SKPD dijadikan sampel penelitian. Untuk masing-masing SKPD diwakili oleh 3 responden yang terdiri dari : (1). Kepala masing-masing SKPD, (2) Kepala bagian/ staf pencatatan keuangan/ akuntansi dan staf pemegang kas SKPD dan (3) Kepala/ staf subbagian akuntansi/ penatausahaan keuangan.

26	Kantor Kesejahteraan Sosial	3
27	Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian Dan Kehutanan	3
28	Rumah Sakit Umum Daerah	3
29	Kecamatan Batang Cinaku	3
30	Kecamatan Siberida	3
31	Kecamatan Rengat Barat	3
32	Kecamatan Rengat	3
33	Kecamatan Rakit Kulim	3
34	Kecamatan Peranap	3
35	Kecamatan Pasir Penyu	3
36	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	3
37	Kecamatan Lirik	3
38	Kecamatan Kuala Cinaku	3
39	Kecamatan Kelayang	3
40	Kecamatan Batang Peranap	3
41	Kecamatan Batang Gangsal Kecamatan Sungai Lala	3
JUMLAH		123

Dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Susi, 2012) yaitu :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Taraf kesalahan yang ditoleransi dalam sampel (5 %)

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{123}{1 + 123 \times (0.05)^2}$$

$$n = \frac{123}{1 + 0.3075}$$

$$n = \frac{123}{1.3075}$$

n = 94.07 dibulatkan menjadi 94

Jadi, dari jumlah 123 responden seluruh SKPD yang digunakan 94 responden.

Data primer diperoleh secara langsung dari SKPD Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner

Kategori yang digunakan pada kuesioner atau angket berdasarkan 5 Skala Likerts, dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nilai jawaban sebagai berikut :

- a. Alternatif SS (Sangat Setuju 5)  
 b. Alternatif S (Setuju 4)  
 c. Alternatif TP (Tidak Pasti 3)  
 d. Alternatif TS (Tidak Setuju 2)  
 e. Alternatif STS (Sangat Tidak Setuju 1)
- Penelitian ini menggunakan variabel Dependen (Y) Nilai Informasi** Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Variabel independen (X) yang terdiri dari : Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (X1), Pengendalian Intern Pemerintah (X2) dan Pengawasan Keuangan Daerah (X3). Pengukuran masing-masing variable adalah sebagai berikut.

### Pengukuran Variabel

Tabel 3.2 Matriks Pengukuran Variabel

No	Variable	Indikator	Acuan
1.	Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1. Keterandalan (reliability) 2. Keterpahaman (understanbility) 3. Keberpautan (relevance) 4. Nilai prediktif (predictive value) 5. nilai balikan (feedback value) 1. ketepatanwaktuan (timeliness) 2. ketepatan penyimbolan (representational faithfulness) 3. keterujian (veryviability) 4. kenetralan (neutrality) 5. keterbandingan (comparability) 6. matrelialitis (materiality)	Peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 (Yuliarta, 2013)
2.	Kompetensi pejabat penatausahaan (X1)	1. Staf yang berkualitas 2. Staf lulusan akuntansi 3. Uraian peran dan fungsi yang jelas 4. Peran dan tanggungjawab yang jelas 5. Uraian tegas sesuai dengan fungsi akuntansi 6. Pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi (SAP) 7. Pelaksanaan proses akuntansi 8. Sumberdaya pendukung operasional 9. Pelatihan-pelatihan untuk	(GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001 (dalam Yuliarta,2013))

		penguasaan dan pengembangan keahlian	
3.	Sistem Pengendalian Pemerintah (X2)	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan	PP No tahun 2008 (dalam Yuliarta, 2013)
4.	Pengawasan Keuangan Daerah (X3)	1. Pelaksanaan dan penatausahaan 2. Pertanggungjawaban keuangan daerah 3. Pendapatan dan belanja daerah	Permendagri no. 23 tahun 2007 (dalam yuliarta, 2013)

### Analisis Data

**Regresi Linear Berganda** digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable independen dengan variable dependen apakah hubungan antara variable independen atau dependen berhubungan positif atau negatif.

Dengan persamaan :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat (Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah)

X<sub>1</sub> = Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan

X<sub>2</sub> = Pengendalian Intern Pemerintah

X<sub>3</sub> = Pengawasan Keuangan Daerah

α = Konstanta

e = Galat (error)

### Uji Kualitas Data

#### 1. Uji Validitas

Pada penelitian ini untuk uji validitas menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Korelasi Produk

Momen Person) yaitu analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan seluruh item (Joko,2010: 40)

## 2. Uji Realibilitas

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Cronbach's Alpha karena metode ini cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-5) atau skor rentang (misal 0-50), (Joko, 2010: 46)

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas, antara lain uji chi-kuadrat, Uji Lilliefors dan uji Kolmogorov-Smirvon. Jika Pvalue (sig) >0.05 maka  $H_0$  tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan data diambil dari populasi yang berdistribusi normal (Joko, 2010:52)

#### 2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dapat diteksi dengan menghitung koefisien ganda dan membandingkan dengannya dengan koefisien korelasi antara variable bebas. Sebagai contoh diambil dari kasus regresi  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  terhadap  $Y$ . Uji Multikolinieritas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (Variance Inflation Factor) dan koefisien korelasi antar variable bebas. Criteria yang digunakan adalah :

- Jika nilai VIF disekitar angka 1 atau memiliki toleransi mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas.
- Jika koefisien korelasi antara variable bebas kurang dari 0,5, maka tidak terdapat masalah kolinearitas (Joko, 2010: 56).

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variace dari residual satu pengamatan kepengamatan lain, model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas digunakan grafik scatter plot yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah  $Y$  yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual ( $Y$  prediksi -  $Y$  sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu  $Y$ , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi dalam regresi apabila dua error  $e_{t-1}$  dan  $e_t$  tidak independen. Autokorelasi biasanya terjadi apabila pengukuran variable dilakukan dalam interval waktu tertentu. Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan diagram antara grafik  $e_{t-1}$  dan  $e_t$  sangat sulit. Autokorelasi tidak terjadi apabila nilai  $d=2$ . Autokorelasi positif terjadi jika  $d$  mendekati 0, sedangkan autokorelasi negative terjadi bila nilai  $d$  mendekati 4 (Joko, 2010:62).

## Uji Hipotesis

### 1. Uji T (t-test)

Uji ini dilakukan terpisah-pisah untuk melihat pengaruh masing-masing variable independen terhadap variable dependennya. Uji T dilakukan untuk membandingkan t hitung dengan t table pada tingkat signifikan 5% (0,05). Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka variable bebas dapat menerangkan terikatnya. Artinya ada pengaruh antara variable bebas dengan variable terikatnya.

- a. Jika  $T_{hitung} < T_{tabel}$  atau p value > a dikatakan tidak signifikan, dan hipotesis penelitian ditolak
- b.  $T_{hitung} > T_{tabel}$  dikatakan tidak signifikan, dan hipotesis diterima Sangat Tidak Setuju 1)

### 2. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Persentase

menunjukkan seberapa besar variable independen dapat menjelaskan variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan satu (1). Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independen menjelaskan variable dependen sangat terbatas. Sebaliknya, semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variable independen menjelaskan variable dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

### Kuesioner

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini: (1) Kepala masing-masing SKPD, (2) Kepala bagian/staf pencatatan keuangan/ akuntansi dan staf pemegang kas SKPD dan (3) Kepala/ staf subbagian akuntansi/ penatausahaan keuangan. Dengan kriteria sampel tersebut maka jumlah responden ada 123.

Berikut adalah tabel rincian tingkat pengembalian kuesioner:

Tabel 4.1. Sampel Dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Total
Kuesioner yang dikirim	94
Kuesioner yang tidak mendapat respon	19
Kuesioner yang kembali dan dapat diolah	75

Sumber : Data Olahan

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu secara langsung. Penyebaran kuesioner dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 dan kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 94. Dari seluruh kuesioner yang disebarkan oleh peneliti, jumlah yang kembali berjumlah 75 (80%) kuesioner dan jumlah kuesioner yang tidak mendapat

respon sebesar 19 kuesioner (20%). Tingginya tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 75 tersebut, dikarenakan kuesioner disebarkan langsung, diantar dan dijemput kembali oleh peneliti.

### Demografi

Gambaran umum responden yang menjadi sampel bisa dilihat pada tabel 4.2 :

Tabel 4.2. Demografi Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
<b>Usia responden :</b>		
a. 23-35 tahun	17	22,67
b. 36-45 tahun	23	30,66
c. 46-55 tahun	32	42,67
d. >56 tahun	3	4,00
<b>Jumlah</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
<b>Jabatan :</b>		
a. Keuangan	44	58,67
b. Non keuangan	31	41,33
<b>Jumlah</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
<b>Jenis kelamin :</b>		
laki-laki	34	45,33
perempuan	41	54,67
<b>Jumlah</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
<b>Masa kerja :</b>		
<5 tahun	12	16
5-10 tahun	22	29,33
>10 tahun	41	54,67
<b>Jumlah</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
<b>Tingkat pendidikan</b>		
a. SMA	-	-
b. D3	-	-
c. S1	47	62,67
d. S2	21	28
e. S3	7	9,33
<b>Jumlah</b>	<b>75</b>	<b>100</b>

### Statistik Deskriptif

Tabel 4.3. Statistik Deskriptif

#### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Informasi	51.6000	3.86250	75
Kompetensi	42.6400	2.40854	75
Pengendalian	62.9067	3.69138	75
Pengawasan	34.1067	2.44713	75

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Dari hasil statistik deskriptif pelaporan keuangan pemerintah dapat terlihat bahwa nilai informasi daerah yang merupakan variabel



dependen yang mempunyai rata-rata jawaban responden adalah 51,6000 dengan memperoleh standar deviasi 3,86250. Sedangkan nilai rata-rata jawaban untuk kompetensi pejabat penatausahaan keuangan adalah sebesar 42,6400 dengan memperoleh standar deviasi sebesar 2,40854. sistem pengendalian intern mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 62,9067 dan memperoleh standar deviasi 3,69138. pengawasan keuangan pemerintah mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 34,1067 dan memperoleh standar deviasi 2,44713. Dilihat dari standar deviasi masing-masing variabel maka variabel sistem pengendalian intern memiliki standar deviasi tertinggi dibandingkan dengan variabel lainnya.

#### Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk ketepatan atau kecermatan suatu

instrument dalam pengukuran, dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan. Dalam penelitian ini pengujian validitas menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Korelasi Produk Momen Pearson) yaitu analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 45 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidaknya pernyataan ini adalah apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansinya 5%  $df = n-2$   $(75-2) = 73$   $r_{tabel} = 0,2272$ . Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 4.4. Rangkuman Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlation	$r_{tabel}$	Keterangan
Kompetensi ( $X_1$ )	KPPK1	0,632	0,2272	VALID
	KPPK2	0,540	0,2272	VALID
	KPPK3	0,678	0,2272	VALID
	KPPK4	0,488	0,2272	VALID
	KPPK5	0,600	0,2272	VALID
	KPPK6	0,407	0,2272	VALID
	KPPK7	0,490	0,2272	VALID
	KPPK8	0,426	0,2272	VALID
	KPPK10	0,689	0,2272	VALID
	Pengendalian ( $X_2$ )	SPI1	0,553	0,2272
SPI2		0,559	0,2272	VALID
SPI3		0,395	0,2272	VALID
SPI4		0,362	0,2272	VALID
SPI5		0,488	0,2272	VALID
SPI6		0,397	0,2272	VALID
SPI7		0,479	0,2272	VALID
SPI8		0,380	0,2272	VALID
SPI9		0,402	0,2272	VALID

	SPI10	0,407	0,2272	VALID
	SPI11	0,582	0,2272	VALID
	SPI12	0,401	0,2272	VALID
	SPI13	0,551	0,2272	VALID
	SPI14	0,708	0,2272	VALID
	SPI15	0,608	0,2272	VALID
Pengawasan (X <sub>3</sub> )	PKD1	0,709	0,2272	VALID
	PKD2	0,698	0,2272	VALID
	PKD3	0,726	0,2272	VALID
	PKD4	0,554	0,2272	VALID
	PKD5	0,747	0,2272	VALID
	PKD6	0,657	0,2272	VALID
	PKD7	0,626	0,2272	VALID
	PKD8	0,665	0,2272	VALID
Informasi (Y <sub>1</sub> )	NI1	0,667	0,2272	VALID
	NI2	0,613	0,2272	VALID
	NI3	0,573	0,2272	VALID
	NI4	0,485	0,2272	VALID
	NI5	0,407	0,2272	VALID
	NI6	0,410	0,2272	VALID
	NI7	0,524	0,2272	VALID
	NI8	0,520	0,2272	VALID
	NI9	0,723	0,2272	VALID
	NI10	0,687	0,2272	VALID
	NI11	0,667	0,2272	VALID
	NI12	0,418	0,2272	VALID

Sumber : pengolahan data hasil penelitian

### Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien cronbach alpha dengan taksiran batasan minimal 0,5. Variabel ini akan dikatakan valid jika cronbach alpha-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Begitu juga sebaliknya jika koefisien alpha

instrumen lebih rendah dari 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian. Pada tabel 4.5 dibawah ini akan menerangkan hasil pengujian reliabilitas dari instrumen untuk setiap variabel penelitian.

Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas

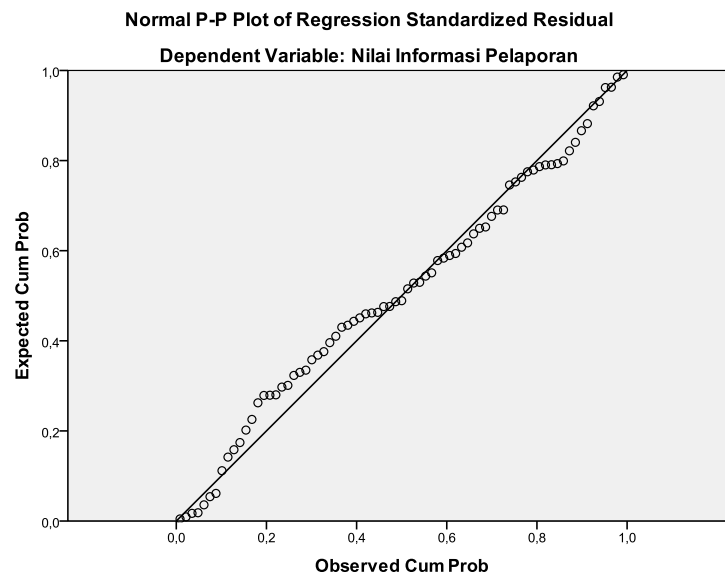
Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Jumlah Item Pertanyaan
Kompetensi	0,775	10
Pengendalian	0,761	15
Pengawasan	0,827	8
Informasi	0,786	12

Berdasarkan tabel IV.5 diatas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen informasi, kompetensi, pengendalian dan pengawasan yang menunjukkan cronbach alpha antara lain 0,775, 0,761, 0,827,0,786. Dari semua nilai ke empat variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien cronbach alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata jawaban responden terdistribusi normal. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat penyebaran titik pada sumbu diagonal grafik *P-P Regression Standardized Residuals*. Jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika titik-titik tersebar acak maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :



Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

#### Grafik 4.1. Normal Probability Standardized Residual

Dari Grafik 4.1 dapat dilihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal (tidak terpenjar dari garis diagonal). Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji T dan Uji  $R^2$  dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

#### Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau *VIF* < 10. Jika *VIF* > 10 maka di anggap terjadi multikolinearitas dengan variabel lainnya, sebaliknya jika

diperoleh  $VIF < 10$  maka dianggap tidak terjadi multikolinearitas antar satu variabel independel yang satu dengan

variabel yang lainnya (Ghozali, 2005) di dalam (Permadani, 2013).

Tabel 4.6. Nilai *Tolerance* dan *VIF*

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kompetensi	,828	1,208	Tidak terdapat masalah multikolinearitas
Pengendalian	,633	1,581	
Pengawasan	,612	1,633	

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

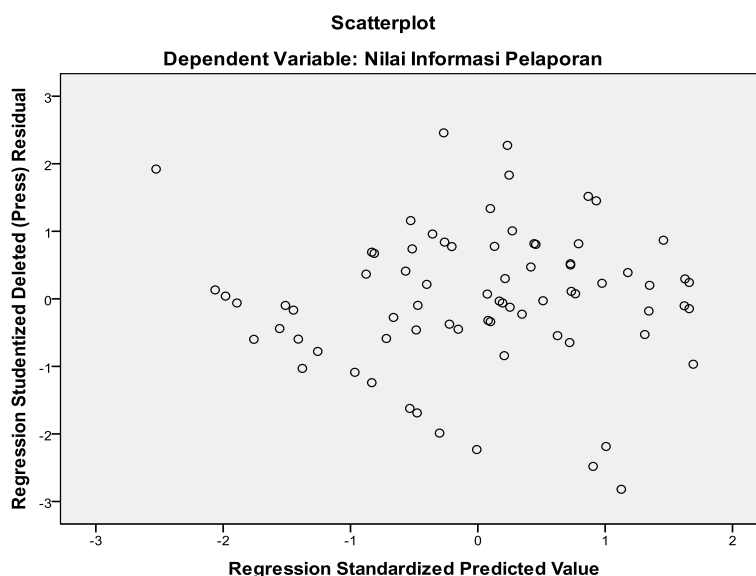
Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai  $VIF < 10$  untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai  $tolerance < 0,10$ . Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

**Uji Heterokedastisitas**

Heterokedastisitas terjadi dalam regresi apabila varian error ( $e_i$ ) tidak konstan untuk beberapa nilai  $x$ . Pendeteksian konstan tidaknya varian error dapat dilakukan dengan menggambar grafik scatter plot yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah dipredisi dan sumbu Y adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ). Artinya garis yang membatasi sebaran

titik-titik relatif paralel maka varians dikatakan konstan.

Gambar 4.2 dibawah ini menunjukkan gambar hasil uji Heterokedastisitas, dimana diagram pencar dimana tidak membentuk pola atau acak, maka regresi pada penelitian tidak mengalami gangguan Heterokedastisitas. Dari gambar grafik *Scatterplot* dibawah ini terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heterokedastisitas pada model regrasi ini, sehingga layak untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen.



Gambar 4.1 :Scatter Plot

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi terjadi dalam regresi apabila dua eror  $e_{t-1}$  dan  $e_t$  tidak independen. Autokorelasi biasanya terjadi apabila pengukuran variabel dilakukan dalam interval waktu tertentu. Mendeteksi ada atau

tidaknya autokorelasi dengan diagram antara grafik  $e_{t-1}$  dan  $e_t$  sangat sulit. Autokorelasi pada penelitian ini dideteksi dengan *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan 2.

Tabel 4.7. Statistik *Durbin-Watson*

Diskriptif	Nilai <i>Durbin-Watson</i>	Keterangan
n = 73, $\alpha = 0,05$	2.002	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa statistik *Durbin-Watson* sebagai hasil output dari SPSS version 17.0 sebesar 2,000. Dalam penelitian ini keberadaan autokorelasi diuji dengan menggunakan *Durbin-Watson* :

1. Jika angka *Durbin-Watson* dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi negatif.
2. Jika angka *Durbin-Watson* diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi positif.
3. Jika angka *Durbin-Watson* diatas +2, berarti ada autokorelasi positif.

Hal ini telah membuktikan bahwa model analisis memenuhi syarat bebas autokorelasi atau tidak terdapat

$$Y = \alpha + \beta_1(X_1) + \beta_2(X_2) + \beta_3(X_3) + e$$

Keterangan:

Y = nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

$\alpha$  = Bilangan konstanta

$\beta$  = Koefisien arah regresi

X1 = kompetensi pejabat penatausahaan keuangan

X2 = sistem pengendalian intern

X3 = pengawasan keuangan pemerintah daerah

e = kesalahan pengganggu (*disturbance's error*)

Dari pengolahan data komputer program SPSS Versi 17.0, maka persamaan regresi berganda akan terlihat sebagai berikut

$$Y = -3,070 + 0,493 + 0,110 + 0,784 + e$$

autokorelasi yaitu berkisar antara -2 sampai dengan +2.

### 4.2. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan metode *enter* dengan bantuan program atau software SPSS versi 17.0, dimana semua variabel independen digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini, menggunakan model analisis regresi berganda yaitu menggunakan variabel kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah dan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga didapatkan persamaan :

- $\alpha$  = -3,070 adalah konstanta yang artinya, apabila variabel kompetensi pejabat penatausahaan keuangan ( $X_1$ ), sistem pengendalian intern ( $X_2$ ), pengawasan keuangan pemerintah daerah ( $X_3$ ), sama dengan 0, maka variabel nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah ( $Y$ ) sebesar -3,070.
- $\beta_1$  = 0,493 adalah koefisien variabel ( $X_1$ ) yang artinya, jika variabel kompetensi pejabat penatausahaan keuangan ( $X_1$ ) naik sebesar satu satuan, maka variabel nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah ( $Y$ ) akan mengalami kenaikan sebesar 0,493 dengan asumsi variabel sistem pengendalian intern ( $X_2$ ), pengawasan keuangan pemerintah daerah ( $X_3$ ), adalah konstan.
- $\beta_2$  = 0,110 adalah koefisien variabel ( $X_2$ ) yang artinya, jika variabel sistem pengendalian intern ( $X_2$ ) naik sebesar satu satuan, maka variabel nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah ( $Y$ ) akan mengalami kenaikan sebesar 0,110 dengan asumsi variabel dengan asumsi variabel kompetensi pejabat penatausahaan keuangan ( $X_1$ ), pengawasan keuangan pemerintah daerah ( $X_3$ ), adalah konstan.
- $\beta_3$  = 0,784 adalah koefisien variabel ( $X_3$ ) yang artinya, jika variabel pengawasan keuangan pemerintah daerah ( $X_3$ ) naik sebesar satu satuan, maka variabel nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah ( $Y$ ) akan mengalami kenaikan sebesar 0,784 dengan asumsi variabel kompetensi pejabat penatausahaan keuangan ( $X_1$ ), sistem pengendalian intern ( $X_2$ ), adalah konstan.

### Pengujian Hipotesis

#### Hasil Pengujian Hipotesis $H_1$

Untuk melihat pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan dengan tingkat kesalahan  $\alpha = 5\%$ . Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$

dan  $P\text{-Value} < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $P\text{-Value} > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama ( $H_1$ )

Variabel	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig.	Keterangan
Kompetensi	3,532	1,6654	0,001 < 0,05	Berpengaruh Signifikan Dan Positif

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Dari tabel diatas terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,532 > 1,6654$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan positif antara kompetensi pegawai penatausahaan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

**H1 : Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Positif Antara Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Untuk melihat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan dengan tingkat kesalahan  $\alpha = 5\%$ . Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $P\text{-Value} < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $P\text{-Value} > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9. :

**Hasil Pengujian Hipotesis H2**

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua ( $H_2$ )

Variabel	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig.	Keterangan
Pengendalian	1,055	1,6654	0,295 > 0,05	Tidak Berpengaruh

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Dari tabel diatas terlihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,055 < 1,6654$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,295 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Oleh karena itu, tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

**H2 : Terdapat Pengaruh Yang Tidak Signifikan antara Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

**5. Hasil Pengujian Hipotesis H3**

Untuk melihat pengaruh pengawasan keuangan pemerintah daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan dengan tingkat kesalahan  $\alpha = 5\%$ . Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $P\text{-Value} < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan

P-Value  $> \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima terhadap variabel dependen. Untuk dan  $H_1$  ditolak, artinya secara parsial lebih jelasnya dapat dilihat pada variabel independen tidak berpengaruh Tabel 4.10 :

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga ( $H_3$ )

Variabel	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig.	Keterangan
Pengendalian	4,909	1,6654	0,000 < 0,05	Berpengaruh Signifikan Positif

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Dari tabel diatas terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4,909 > 1,6654$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan positif antara pengawasan keuangan

pemerintah daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

**H3 : Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Positif Antara Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Tabel 4.11. Rangkuman Hasil Pengujian Uji Statistik t

Hipotesis	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig.	Keterangan
Terdapat pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah	3,532	1,6654	0,001 < 0,05	$H_0$ : Ditolak $H_1$ : Diterima
Terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah	1,055	1,6654	0,295 > 0,05	$H_0$ : Diterima $H_2$ : Ditolak
Terdapat pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap	4,909	1,6654	0,000 < 0,05	$H_0$ : Ditolak $H_3$ : Diterima



nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah				
--	--	--	--	--

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

#### 4.5.3. Hasil Pengujian Koefesiensi Determinasi (Adj. R<sup>2</sup>)

Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model yang ditetapkan dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila R<sup>2</sup> bernilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada variasi variabel

dependen yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut. Apabila R<sup>2</sup> bernilai 1, maka dapat disimpulkan bahwa semua variasi dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan R<sup>2</sup> bernilai 0 dan 1, berikut adalah hasil perhitungan R<sup>2</sup> dengan menggunakan SPSS versi 17.0.

Tabel 4.12 : Hasil Pengujian Koefesien Determinasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,745 <sup>a</sup>	,555	,536	2,63111	2,002

Sumber : Pengelolaan Data Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel yang diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,754 atau 75,4% dan R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,555 atau 55,5%. memberi penjelasan bahwa 55,5% nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di pengaruhi oleh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan pemerintah sedangkan 44,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat faktor individual lain sebesar 44,5% yang bisa dijelaskan oleh variabel yang lain yang dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### Pembahasan

##### 1. Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara kompetensi pejabat penatausahaan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hubungan positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi pejabat penatausahaan keuangan maka semakin tinggi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena menurut peneliti kompetensi pejabat penatausahaan keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi nilai

informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Kompetensi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan dalam dunia pemerintahan, setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Oleh karena itu, perubahan pada kompetensi pejabat penatausahaan keuangan akan di ikuti dengan perubahan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah artinya apabila semakin baik kompetensi pejabat penatausahaan keuangan maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan yang dihasilkan.

Hal inilah yang mendorong instansi pemerintah untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan yang dimilikinya melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dan kebijakan lainnya yang mendukung pencapaian tujuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang bernilai informasi dan bermanfaat bagi pemakai. Dari hasil penelitian ini diketahui subbagian penatausahaan keuangan memiliki staf yang berkualitas dalam jumlah yang cukup, memiliki staf subbagian penatausahaan keuangan yang merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi serta adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dan tugas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Wahyono (2004:12), dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai menyangkut 2 elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut sumber daya yang menghasilkan Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) harus mempunyai kompetensi di bidang akuntansi atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Yuliarta (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi pejabat penatausahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Kesignifikanan ini disebabkan kondisi kualitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang mendukung. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada diakui cukup dari sisi jumlah maupun kualifikasinya.

## **2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian penelitian ini menolak hipotesis yang kedua, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan

pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ketidaksignifikanan ini dikarenakan Sistem pengendalian Kabupaten Indragiri Hulu pada saat ini dapat dikategorikan masih lemah, sehingga fungsi internal control belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kasus permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern diantaranya (1) BUD Kabupaten Indragiri Hulu belum menerapkan *Treasury Single Account*, (2) terdapat kesalahan penganggaran belanja modal dan belanja barang di 25 SKPD (3) terdapat penyertaan modal berupa aset kepada PDAM Tirta Indra yang tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan dokumen yang sah dan memadai, (4) penyertaan modal kepada PD Indragiri dan tiga aset yang belum diketahui tidak dapat diyakini kewajarannya. Dari permasalahan yang ada maka masih perlunya pembenahan terhadap peningkatan sistem pengendalian intern

Sehubungan masih banyaknya temuan BPK atas lemahnya sistem pengendalian intern yang mengakibatkan kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW) bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas sebagian besar LKPD di Indonesia. sehingga masih perlunya peningkatan terhadap sistem pengendalian intern, Karena apabila semakin baik sistem pengendalian intern maka akan berdampak meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Choirunisah (2008), yang

menemukan internal kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi instansi. Ketidaksignifikan ini disebabkan karena masih banyaknya temuan BPK terhadap LKPD mengenai permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern.

### **3. Pengaruh Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara pengawasan keuangan pemerintah daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.. Hubungan positif menunjukkan bahwa semakin tinggi pengawasan keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena menurut peneliti pengawasan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Pengawasan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dikarenakan pengawasan keuangan pemerintah merupakan suatu media yang dapat menunjang untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan memenuhi karakteristik nilai informasi pelaporan keuangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perubahan pada pengawasan keuangan daerah akan di ikuti dengan perubahan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah artinya apabila pengawasan berjalan dengan baik maka nilai informasi pelaporan keuangan yang dihasilkan juga semakin baik. Dari

hasil penelitian ini diketahui peran SKPD dalam pengawasan keuangan pemerintah daerah telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. hal ini ditandai dengan bukti pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran daerah sah, lengkap, dan tepat waktu serta laporan keuangan SKPD telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Tausikal (2007) dalam Yuliarta (2013) menyatakan bahwa untuk menyajikan informasi keuangan yang andal kepada para pemakai agar sesuai dengan standar yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah. Dimana, pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian

internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi-kondisi. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. maka, apabila pengawasan tidak dilakukan dengan baik akan ditakutkan adanya peluang penyelewengan keuangan serta kecurangan-kecurangan lainnya

Hal ini juga didukung dengan penelitian Yuliarta (2013) menyatakan, pengawasan keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peningkatan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan SKPD ini sangat penting karena semakin baik pengawasan keuangan daerah maka pengelolaan keuangan akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja yang baik yang akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 5.1. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 1, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji kompetensi pejabat penatausahaan, sitem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara kompetensi pejabat penatausahaan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hubungan positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi pejabat penatausahaan keuangan maka semakin tinggi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, keeratan hubungannya adalah cukup kuat.
2. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian penelitian ini menolak hipotesis yang kedua, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara pengawasan keuangan pemerintah daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hubungan positif menunjukkan bahwa

semakin tinggi pengawasan keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, keeratan hubungannya adalah kuat.

4. Hasil penelitian Koefisien determinasi atau Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,536 memberi penjelasan bahwa 53,6% nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di pengaruhi oleh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan pemerintah sedangkan 46,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat faktor individual lain sebesar 46,4% yang bisa dijelaskan oleh variabel yang lain yang dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

##### 5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini, yaitu :

1. Ruang lingkup Penelitian ini hanya dilakukan pada SKPD kabupaten Indragiri Hulu sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan kesemua objek secara keseluruhan
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kompetensi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah dan hanya menggunakan sampel yang relative sedikit yaitu 75 responden.
3. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta kurangnya kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada.

Ada kemungkinan jawaban yang diberikan responden tidak jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden

### 5.3. Saran

Ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi pejabat penatausahaan yang berkualitas dapat memberikan suatu pelatihan-pelatihan serta melakukan sosialisasi terhadap para pejabat penatausahaan mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengkajian ulang serta membenahi sistem pengendalian intern pemerintah sebab pada prakteknyamasih adanya permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) pada Kabupaten Indragiri Hulu. Karena apabila pemerintah dapat
3. Pengawasan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah baik dilakukan. Agar nilai informasi yang dihasilkan laporan keuangan oleh pemerintah dapat terus ditingkatkan. Pemerintah diharapkan dapat terus membenahi sistem pengawasan yang sudah ada, agar apa yang menjadi target pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat tercapai.
4. Didalam penelitian ini, terdapat variabel sistem pengendalian intern yang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat menguji kembali secara khusus mengenai variabel sistem pengendalian intern serta dapat memperluas daerah penelitian dan menambah variabel lainnya yang memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

membenahi sistem pengendalian intern dengan baik maka akan dapat memberikan fungsi dalam hal memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan laporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N. Edisi 11. *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat
- Arens, Alvin A, Randal J Elder & Mark Sbeasley. 2003. *Auditing Dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Erlangga
- Ariesta, Fadila. 2013. *Pengaruh Kulaitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupataen Pasaman Barat)*. Jurnal Penelitian Universitas Negeri Padang
- Arfianti, Dita. (2011). *Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Di Kabupaten Batang)*. Jurnal Penelitian Akuntansi
- Armando, Gerry. 2013. *Pengaruh System Pengendalian Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Penelitian Universitas Negeri Padang.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Ri. 2013. *Ikhtisar Hasil Penelitian Semester 1 Tahun 2013*. ([Http://Bpk.Com](http://Bpk.Com)) Diakses Tanggal 20 Oktober 2013.
- Bastian, Indra. 2007. *Auntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Yogyakarta: Erlangga.
- Choirunisah, Fariziah. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi*. Jurnal Penelitian UGM, Yogyakarta.
- Dellano, Galuh Fajar dan Deviani. 2013. *Pengaruh kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Pengawasan Keuangan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemrintah Daerah*. Jurnal WRA. Vol 1. No.1
- Dwi Priyatno, 2009, *Mandiri Belajar SPSS*, PT. Mediakom, Yogyakarta.
- Fikri, Ahmad. 2013. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Diera Otonomi Daerah*. Genta Press: Yogyakarta
- Hall, James A. *Accounting Information Systems*. Salemba Empat: Jakarta
- Husna, Fadila .2013. *Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia Sistem Pengendalian Intern Dan Pengawaan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah*. Jurna Penelitian Unevesitas Negeri Padang.
- Indrawati, Dwi Anita. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Penelitian
- Indriasari, Desi (2008). *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai*

*Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah*. Jurnal Penelitian Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press: Yogyakarta

Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Daerah*. Andi: Yogyakarta.

Mondy, Wayne. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga: Jakarta

Mulya, Hadri. 2013. *Memahami Akuntansi Dasar*. Mitra Wacana Media: Jakarta

Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Setor Public Organisasi Non Laba*.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung

Sukmaningrum, Tantriana. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah*. Jurnal Penelitian Universitas Diponegoro

Sulistiyono, Joko. 2010. *6 Hari Jago SPSS*. Cakrawala: Yogyakarta

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta :Graha Ilmu

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE

Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Alfabeta: Bandung.

Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemrograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Weygandt, Jerry J, Donald E. Kieso & Paul D. Kimmel. 2009. *Accounting Principles*. Jakarta: Salemba Empat

Yuliarta :2013. *Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)*. Jurnal Penelitian Universitas Negeri Padang.

### **Dokumen Dan Literature Penunjang**

Republik Indonesia, Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN



Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

-----, Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal Tentang Pelaporan Keuangan Dan Inerja Instansi Pemerintah.

-----, undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010, Tentang Pengawasan Keuangan Daerah

<http://www.bpk.go.id/web/>

<http://www.inhukab.go.id/>